

MEMBACA FENOMENA AGRARIA TERKINI MELALUI KRITIK KAPITAL PADA PENGALAMAN KEHILANGAN

Asri Widayati^{1*}

¹Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Jalan Sosiohumaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

*Corresponding author: asri.widayati@mail.ugm.ac.id

Abstract *Studi ini menawarkan pembacaan teoritis baru mengenai fenomena agraria belakangan, khususnya mengenai orang-orang yang di beberapa tempat di Indonesia yang alih-alih menolak untuk menjual lahannya ke berbagai perusahaan. Sebaliknya, beberapa dari mereka justru mengundang perusahaan untuk menyerahkan sertifikat lahannya maupun mau untuk menyerahkan sertifikat lahannya karena tergiur ganti rugi miliaran. Fenomena semacam itu, ketika dibaca dalam konteks perampasan, atau dalam kerangka kapitalisme pabrik, pertentangan antara kelas-kelas yang berbeda. Maka, kesimpulan yang muncul dari beberapa aktivis dan advokat yang berada di wilayah tersebut akan menuduh beberapa orang itu “rakus” dan semacamnya. Melalui studi ini, tawaran ulang pembacaan disajikan untuk melihat kembali fenomena dengan kemungkinan kesimpulan bahwa saat ini kapitalisme tidak sekadar hadir konfrontatif dan terus bertentangan dengan kelas-kelas yang berbeda. Namun, kapitalisme secara ramah tamah (benign capitalism) hadir melalui berbagai cara. Pengalaman kehilangan yang dipelajari dalam tradisi antropologi mempertajam pembacaan, bahwa benign capitalism yang salah satunya hadir dalam rupa perubahan strategi bisnis yang lebih ramah-tamah, bermitra dengan berbagai agensi baik negara maupun non-negara. Siasat semacam itu dapat “menambal” perasaan orang-orang untuk kembali mengalami kehilangan. Di sisi lain, melalui pembacaan pengalaman kehilangan, pada kenyataannya menunjukkan kapitalisme yang ramah justru mengemuka sebagai “kehadiran yang mengganggu”. Karena, tak jarang, setelah penyerahan lahan ke perusahaan, keputusan tersebut memukul kondisi orang-orang.*

Keyword:

Pengalaman kehilangan, benign capitalism, neoliberalisme

Article Info

Received : 13 Nov 2023

Accepted : 19 Nov 2023

Published : 20 Nov 2023

1. Pendahuluan

Tulisan ini menanggapi fenomena agraria belakangan, khususnya ketika mendengar kabar dari seorang kawan yang tinggal di sebuah pulau di Indonesia bagian timur, tepatnya di Pulau Halmahera. Banyak orang yang alih-alih menolak untuk menjual lahannya demi kepentingan pertambangan, sebaliknya beberapa orang tersebut justru mengundang perusahaan tambang untuk menyerahkan sertifikat lahannya (Komunikasi dengan A, 2023). Cerminan realitas yang

hampir mirip terjadi di awal tahun 2021 pada orang-orang Jenu, Tuban, Jawa Timur yang tiba-tiba menjadi miliarder dan berbondong membeli mobil mewah hasil dari menjual lahannya ke perusahaan pengilangan minyak (Agriesta, 2021). Tidak berselang lama, masih di tahun yang sama, orang-orang di tiga Desa di Kecamatan Balongan, Indramayu, Jawa Barat juga diberitakan menjadi miliarder setelah menjual lahannya ke perusahaan petrokimia yang hendak dibangun mulai tahun 2023 (Kurniati, 2021; Priyanto, 2021).

Fenomena fantastis tersebut menunjukkan sebuah kenyataan yang berbanding terbalik dari apa yang sering banyak pemikir agraria sebut sebagai “perampasan” (Tobias Haller, 2019; John McCarthy, 2010; Benjamin White, Saturnino M Borrás, Ruth Hall, Ian Scoones, & Wendy Wolford, 2012). Perdebatan, apakah proses ekonomi-politik termasuk sejarahnya, utamanya kekuasaan yang tercakup di dalam negara dan korporasi telah membuat warga kalah dan akhirnya kehilangan lahan sekaligus ketahanannya (Haller, 2019). Berkaca pada realitas tersebut dengan begitu kurang berlaku lagi. Warga Sukareja, misalkan, beberapa dari mereka datang ke kantor ATR/BPN membawa *sertipikat*—istilah yang dipilih dalam acara serah terima sertifikat—lahan mereka untuk diserahkan ke perusahaan. Ketika berkas dan persetujuan lengkap, di hari yang sama, warga bisa mencairkan uang berkisar ratusan hingga miliar lewat rekeningnya (Sapropudin, 2021).

Fenomena agraria kiwari ini di berbagai tempat di Indonesia mungkin telah terjadi, namun teori-teori agraria kritis, khususnya yang masih berkuat pada debat mengenai istilah perampasan tanah, perampasan lahan, perampasan, akuisisi lahan, dan semacamnya dari banyak pemikir (dari Haller, 2019; McCarthy, 2010; White et al., 2012), belum cukup memuaskan untuk membaca mengapa kapitalisme hari ini datang kepada warga seolah-olah sebagai kawan. Lantas bagaimana menerangkan secara teoritis realitas ekonomi-politik kapitalis semacam itu, untuk kemudian dapat mengkritiknya.

Tidak berangkat untuk menjelaskan mengapa kini peristiwa tersebut dapat terjadi, tulisan ini ingin lebih memperkenalkan sebuah pembacaan baru yang disebut sebagai “mendekati manusia” dalam antropologi melalui sebuah pengalaman kehilangan (Bille, Hastrup, & Soerensen, 2010) yang dikaitkan dengan *benign capitalism* (D’Souza, 2005; McNamara, 2012). Di mana hari ini, kapitalisme tak berwajah seperti entitas jahat yang terus saja dilawan. Atau tidak sekadar digambarkan oleh Karl Marx (2004) dalam kapitalisme pabrik, di mana akan terus ada ketegangan antara kapitalis dengan borjuis, atau pemberi kerja dengan pekerja. Yang mana, di satu sisi mengedepankan keuntungan sebanyak-banyaknya, di sisi yang berlawanan mengedepankan kesejahteraan seluas-luasnya.

Para Marxis seperti Tithi Bhattacharya (2017); Nancy Fraser & Rahel Jaeggi (2018); dan Jason W. Moore (2015) telah membuka lebar kritik kapitalisme melalui elaborasi mengenai apa yang disebut sebagai kapitalisme diperluas. Yang mana, kapitalisme tidak hanya berlangsung dalam relasi antara pekerja dengan pemberi kerja, namun juga meraup keuntungan di luar sirkuitnya (Bhattacharya, 2017). Karenanya menurut Moore (2017), kapitalisme selama ini tidak hanya melakukan eksploitasi atau penghisapan nilai lebih pada buruh (eksploitasi), namun juga menghisap nilai yang tak dibayarkan (apropriasi) kepada buruh dan non buruh (*extra human nature*). Yakni melalui apropriasi berbagai hal yang disebut murah bahkan tak dibayarkan atau *Seven Cheap Nature* berupa *nature, money, work, care, food, energy and lives* (Patel & Moore, 2017).

Melalui berbagai penyelidikan mengenai kapitalisme yang diperluas tersebut, dengan titik mulai yang agak berbeda, tulisan ini akan menawarkan pembacaan teoritis mengenai pengalaman kehilangan dan sebuah “kehadiran yang mengganggu” di mana kapitalisme bekerja sedemikian rupa di luar sirkuit namun tetap menunjang sirkuitnya. Ditunjukkan salah satunya

pada fenomena bagaimana perusahaan dapat membujuk orang-orang Desa Sukareja, Indramayu, Jawa Barat yang pernah mengalami kehilangan lahan dan tempat tinggal di tahun 1990-an karena pembangunan kilang minyak (Maneke, 2016). Di tahun 2021, dengan iming-iming ganti rugi miliaran orang-orang Sukareja yang dahulu direlokasi dan menetap di Desa Sukareja Baru yang berjarak kurang lebih 3 km dari kawasan operasi kilang minyak tersebut. Kini, orang-orang Sukareja Baru mau untuk kembali mengalami kehilangan lahan dan tempat tinggal demi kepentingan pembangunan perusahaan petrokimia.

Fenomena tersebut menunjukkan kenyataan dan hasil dari kehadiran kapitalisme yang justru datang seolah-olah sebagai “kawan” yang tak lain tujuannya adalah menambal potensi kembalinya orang-orang untuk mengalami kehilangan. Meskipun berbagai tambalan itu, pada dasarnya tidak dapat mengatasi perasaan luka dan duka orang ketika kembali mengalami kehilangan. Sebab di antara orang-orang yang bersuka-ria mendapat ganti rugi miliaran, tak sedikit orang-orang Sukareja yang mendapatkan nominal jauh di bawahnya. Bahkan keputusan orang-orang tersebut untuk mau menyetujui pembebasan lahan karena rasa takut berhadapan dengan urusan “pengadilan” (CNN Indonesia, 2021).

2. Metode

Tulisan ini merupakan hasil dari tinjauan terhadap beberapa literatur pemikiran agraria. Dan juga hasil tinjauan literatur terhadap satu buku inti yang melacak mengenai pengalaman kehilangan dari Mikkel Bille, Frida Hastrup, Tim Flohr Soerensen berjudul *An Anthropology of Absence: Materializations of Transcendence and Loss (2010)*. Melalui tinjauan literatur-literatur tersebut, ditambahkan dengan informasi melalui wawancara langsung dengan interlocutor dan juga informasi yang didapatkan dari berita daring. Diperoleh tawaran pembacaan fenomena agraria terkini, khususnya fenomena yang selama ini dibaca melalui konsep perampasan dan/atau kapitalisme pabrik (*labour centered*). Menuju sebuah pembacaan fenomena agraria terkini yang dibaca melalui *benign capitalism* yang juga dikaitkan dengan “pengalaman kehilangan” yang dipelajari dalam tradisi antropologi. Arah dari pembacaan fenomena agraria terkini melalui *benign capitalism* dan antropologi kehilangan, membantu melacak pengalaman kehilangan orang-orang, bukan saja kehilangan yang dapat dilihat secara fisik, visual, dan jasmani. Namun, melalui cara “mendekati manusia” yang mampu memunculkan dan membaca pengalaman kehilangan sebagai sesuatu yang hadir dalam diri orang-orang tersebut secara material bahkan aktual hadir di masa kini. Sebuah celah pembacaan yang belum dapat didekati oleh proses identifikasi pengalaman kehilangan yang diperdebatkan para pemikir yang menggunakan konsep dan istilah “perampasan” yang sekadar melihat kehilangan sebagai sesuatu yang secara visual, fisik, dan jasmani eksis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Memahami Istilah Perampasan

Fenomena orang-orang Halmahera yang mengundang perusahaan untuk menyerahkan sertifikat lahannya ke berbagai perusahaan sekitar. Serta fenomena orang-orang di Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur dan orang-orang di Kecamatan Balongan, Indramayu, Jawa Barat yang mendadak menjadi miliarder karena mengantongi uang ganti rugi hasil pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan perusahaan pengilangan minyak dan perusahaan petrokimia. Fenomena tersebut jika dilihat secara fisik dan visual menunjukkan keputusan orang-orang yang mau untuk menyerahkan lahannya. Bahkan boleh jadi, dengan “sukarela” orang-orang mau mengundang perusahaan dan/atau mau menyerahkan sertifikat lahannya karena tergiur ganti rugi uang dengan nominal miliaran rupiah. Berbagai fenomena yang juga menunjukkan

gambaran orang-orang yang “seolah-olah” tidak merasa kehilangan karena lahannya tergantikan dengan nominal uang yang fantastis.

Akan tetapi, pertanyaannya, berangkat dari fenomena agraria yang terjadi akhir-akhir ini tersebut, mengapa secara visual dan fisik mereka menjadi seolah-olah “tunduk” kepada perusahaan dengan cepat. Fenomena yang sangat berbeda dari, misalkan, realitas yang digambarkan oleh hasil penelitian White et al. (2012); McCarthy (2010), yang mana melalui proses sejarah material dan kekuasaan tertentu, akhirnya orang-orang kehilangan lahannya. Baik melalui proses penyerobotan maupun melalui sejarah perampasan yang berlangsung dan tercakup dalam lintasan rezim yang berbeda-beda dalam negara, yang bersamaan dengan proses liberalisasi dan neoliberalisasi dari waktu ke waktu. Namun pada intinya, para pemikir tersebut akan senantiasa melihat suatu “pengalaman kehilangan” dari apa yang mereka bisa lihat secara “visual dan fisik” yang tercermin pada munculnya istilah tanah, lahan, akuisisi lahan, perampasan tanah, perampasan, dan semacamnya yang mereka gunakan dalam hasil penelitian.

Oleh karenanya, menjadi penting untuk sedikit memahami istilah “perampasan” dan beberapa perdebatannya dalam tulisan ini. Perampasan merupakan istilah yang sering digunakan oleh banyak pemikir yang berfokus pada isu agraria, khususnya agraria kritis. Benjamin White et al. (2012) dalam *The new enclosures: critical perspectives on corporate land deals*, misalkan, di awal penjelasan karya pentingnya ini lebih memilih istilah “perampasan” untuk melampaui sekadar istilah akuisisi lahan maupun akuisisi sumber daya. Meskipun pada kenyataannya, frasa “perampasan tanah” dan “perampasan lahan” yang sebenarnya merupakan istilah yang berbeda dari “perampasan” masih terus diulang dalam tulisannya, tanpa memperhatikan konsekuensinya.

Termasuk ketika Ben White et al. (2012) dalam tulisannya tersebut menjelaskan fenomena perampasan, merujuk pada fragmen-fragmen hasil penelitian, khususnya penelitian penting dari John McCarthy (2010) berjudul *Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia*. McCarthy melalui hasil penelitiannya memang menjelaskan proses inklusi dan inkorporasi merugikan yang dialami khususnya oleh petani skala kecil akibat merangseknya sawit di Sumatra. Proses yang ia sebut berkait kelindan dengan kebijakan negara dan perlahan juga agensi non-negara. Proses dan konsekuensi proses itulah yang oleh White et al. (2012) juga sebut sebagai “perampasan lahan” karena bukan sekadar akuisisi lahan. Namun lagi-lagi, tidak konsistennya pemilihan istilah seperti akuisisi lahan, perampasan lahan, perampasan, dan semacamnya, sebenarnya memiliki konsekuensi yang signifikan.

Signifikansi itu akan tampak ketika telah membaca studi Tobias Haller di Afrika berjudul *The different meaning of lands in the age of neoliberalism: theoretical reflections on commons and resilience grabbing from a social anthropological perspective* (2019), bagaimana studinya tersebut berkontribusi pada pelacakannya pada makna tanah dan penyempitan makna perampasan yang disederhanakan pada frasa “perampasan tanah”. Bagi Haller, penyempitan itu telah memunculkan konsekuensi besar, bahkan untuk banyak pemikir agraria. Ataupun juga bagi pemangku kebijakan baik negara maupun non-negara. Penyempitan itu dapat berarti ketersesatan ataupun peluang bagi pemangku kepentingan untuk menyembunyikan perampasan yang sesungguhnya.

Kita dapat membayangkan hal itu dari penjelasan Haller pada satu kasus mengapa di suatu tempat di Afrika batasan suatu wilayah lebih fleksibel, misalkan, mengacu pada permeabilitas atau mengikuti pola terjadinya banjir (Haller, 2019). Pada titik itulah, memperluas makna tanah dan perampasan tanah yang sempit, menyelidiki melalui pandangan emik masyarakat Afrika atas makna tanah dan juga melalui perspektif institusionalis, Haller melihat makna tanah selain tak

dapat dipukul rata maknanya. Namun juga, tanah berhubungan dengan institusi milik bersama yang seringnya tidak selalu anti dengan kepemilikan individu tetapi terikat erat dengan institusi milik bersama. Tanah dengan begitu berhubungan dengan aspek lainnya seperti padang rumput, perikanan, satwa liar, air, dan sebagainya sebagai institusi yang terbentuk dan dibentuk di dalamnya.

Berangkat dari hal itulah, bagi Haller istilah “perampasan tanah” hanya memotret perampasan atas lahan tanpa melihat relasi institusi milik bersama maupun keterikatan tanah itu dengan aspek yang lain. Haller mengungkap apa yang disembunyikan oleh istilah “perampasan tanah” atau makna “tanah” yang telah digunakan oleh banyak agensi, bahkan saat ini merambah agensi non-negara untuk menyembunyikan perampasan institusi milik bersama dan aspek lainnya yang tercakup dalam tanah yang sesungguhnya. Ia menyebut realitas semacam itu sebagai perampasan milik bersama dan perebutan ketahanan. Sebab yang dirampas bukan sekadar “tanah” yang ada di benak para pemikir tersebut pada umumnya.

Pandangan dan hasil penelitian Haller di Afrika itu menurut saya menarik. Meskipun setelahnya, Haller tak banyak bicara lebih mendalam mengenai konsepsi perampasan milik bersama dan perebutan ketahanan itu. Namun, konsepsi yang mirip dengan pandangan Haller tersebut telah banyak dibicarakan oleh pemikir dalam perkembangan konsep ekologi politis, terutama ekologi politis generasi ketiga (Darmanto, 2013). Khususnya generasi pemikir ekologi politis yang bertautan dengan pandangan Marxis mengenai sosioalamiah (Swyngedouw, 2006). Suatu pandangan tentang tidak memisahkan Alam dan Manusia, melainkan manusia dengan entitas-non manusia (air, satwa liar, padang rumput, dan sebagainya) itu berpilin.

Lalu ketika pandangan tersebut dihubungkan kembali dengan penjelasan Haller mengenai paradoks neoliberalisme, yang mana agensi negara dan non-negara saat ini berkontribusi besar dalam perampasan hari ini. Agensi-agensi itu kini lebih mampu berperan merestrukturisasi hubungan sosioalamiah tersebut (White et al., 2012). Argumen yang persis muncul dari para pemikir ekologi politis urbanisasi yang meminjam istilah para Marxis yang memiliki pandangan sosioalamiah seperti Erik Swyngedouw (1996). Ataupun mereka yang meminjam makna kapitalisme dari Jason W. Moore bahwa “kapitalisme bukanlah sistem sosial, bukan pula sistem ekonomi, melainkan cara-cara mengorganisir alam” (J. Moore, 2015, p. 6).

Makna kapitalisme menurut Moore itu dihasilkannya dari penyelidikan atas ketidaksepatannya terhadap *Green Thought* maupun *Green Arithmetic* yang cenderung berpikir bahwa Alam dan Manusia itu terpisah (J. W. Moore, 2017). Salah dua pemikiran (*thought*) yang bersumber dari filsafat arus utama Kantian dan Cartesian. Pelampauan terhadap kedua tradisi filsafat dualistik tersebut dalam perkembangan konsep ekologi politis menghasilkan salah satunya ekologi politis yang bersifat “sosioalamiah”. Yakni perkembangan ekologi politis saat ini yang lebih mampu melihat realitas perampasan tidak hanya terjadi dari manusia kepada manusia. Namun berlangsung secara dialektis, yang Moore (2018) sebut sebagai *double internality* yakni *human-in-nature* sekaligus *nature-in-human*. Suatu hubungan yang integral, tercakup dalam hubungan antara manusia dengan entitas non manusia yang berpilin.

Pengaruh dari dialektika semacam itu mengemuka pada penelitian yang dilakukan oleh Koalisi Maleh Dadi Segoro, Semarang (Bosman Batubara, dkk. 2021) dalam buku Banjir Sudah Naik Seleher. Khususnya pada bagian buku yang berjudul *Ekologi Politis Urbanisasi*, dan *Urbanisasi DAS Silandak: Bencana Secara Timpang*. Pada bagian *Ekologi Politis Urbanisasi* lebih diterangkan secara teoritis perkembangan ekologi politis, khususnya pengaruh pemikir *urban political ecology* dan *political ecology of urbanisation* yang menurut para penulis kehilangan “momen sosioalamiah” sehingga perlu di-ekologi-kan.

Berangkat dari polemik teoritis itu, para penulis, khususnya Bosman, kemudian

merumuskan tiga momen yang mampu untuk mengurai kekurangan signifikan dari perkembangan *urban political ecology* dan *political ecology of urbanisation*. Tiga momen itu ialah momen-momen yang berlangsung bersamaan dalam rupa urbanisasi, yakni momen rekonfigurasi spasial, momen sosioalamiah, dan momen ketimpangan (Batubara, dkk. 2021). Penjelasan itu lebih material ditunjukkan kemudian dalam bagian buku selanjutnya yakni mengenai *DAS Silandak*, yang merupakan bagian dari proyek etnografi tentang banjir Semarang.

Pada bagian penjelasan DAS Silandak kita akan melihat “perampasan” selain bukan hanya perampasan manusia kepada manusia, namun perampasan juga dapat dilihat sebagai proses rekonfigurasi sosiospasial, yang secara bersamaan mensyaratkan momen sosioalamiah. Ditunjukkan pada kasus material pemaprasan bukit di dekat Kampung Pucung untuk perluasan proyek Kawasan Industri Candi (KIC). Proses pemaprasan bukit yang merupakan proses rekonfigurasi sosiospasial, yakni bukit dihancurkan dan ditata ulang (Brenner & Schmid, 2015) menjadi KIC. Proses tersebut ternyata “mensyaratkan” momen sosioalamiah, yakni berupa rusaknya bangunan sekolah, masjid, dan rumah-rumah warga Kampung Pucung di mana ciri tanah liat yang mudah bergeser menjadi semakin mudah bergeser karena proses pemaprasan bukit.

Momen rekonfigurasi sosiospasial itu mensyaratkan momen sosioalamiah yakni, warga Kampung Pucung terpaksa untuk relokasi ke tempat lain. Momen yang mengubah hubungan manusia Kampung Pucung dengan entitas non-manusia (dalam rupa kampungnya termasuk lahan, institusi milik bersama, dan ketahanannya) melalui “paksaan relokasi”, sehingga Kampung Pucung memiliki batasan dan tak bertahan lama untuk ditempati.

Tak sampai di situ saja, hasil dari pemaprasan bukit di Kampung Pucung ternyata digunakan untuk reklamasi Pantai Marina demi kebutuhan pembangunan Promosi Pekan Raya Pembangunan (PPRP). Namun, reklamasi juga telah mengubah laut menjadi eksklusif dan tak dapat diakses nelayan. Reklamasi yang membutuhkan pembelokkan aliran sungai di dekat pantai, ternyata menciptakan atau memproduksi ROB dan Banjir di pantai dan sungai sekitar. Membuat nelayan tak dapat lagi melaut. Lagi-lagi momen sosioalamiah berlangsung bersamaan dengan momen rekonfigurasi sosiospasial.

Dan kembali pada rupa urbanisasi, khususnya pada proyek perluasan KIC yang menurut pemerintah dan pengembang adalah “pembangunan”, pada kenyataannya memproduksi pula ketimpangan yang dapat dibayangkan seperti sebuah jungkat-jungkit (Smith, 2008). Yakni yang disebut sebagai “pembangunan” KIC di satu sisi, namun ketimpangan berupa relokasi warga Kampung Pucung dan nelayan yang tak lagi dapat lagi mencari ikan di sekitar Pantai Marina di sisi yang lain. Banjir dan rob yang seolah-olah tampak sebagai konsekuensi, pada kenyataannya, merupakan bencana yang diproduksi integral dalam momen-momen timpang (jungkat-jungkit) tersebut.

Kasus banjir dan rob sebagai bencana yang diproduksi secara timpang itu menarik. Karena penjelasannya persis seperti mengoperasionalkan, namun lebih mendalam pandangan dari Haller mengenai perebutan ketahanan dan perampasan milik bersama. Karena rupa bencana yang diproduksi secara timpang seperti banjir dan rob, merupakan bagian dari restrukturisasi dari hubungan air, tanah, dan manusia di Kawasan KIC dan Kampung Pucung, yang juga relasional dengan rob dan banjir yang terjadi di kawasan proyek Reklamasi Pantai Marina. Kasus yang memadai untuk melihat perampasan tak berujung, melampaui konsepsi perampasan ketahanan dan perampasan milik bersama dari Haller. Meskipun bagi saya, masih terdapat kekurangan pada konteks memperlihatkan hal-hal yang lebih spesifik seperti apa yang terjadi pada orang-orang yang telah dirampas dan mengapa mereka seolah-olah mau dirampas, yang membuat mereka memiliki sebuah pengalaman yang disebut sebagai “pengalaman kehilangan”

baik lahan, tempat tinggal, maupun mata pencaharian, dan lainnya.

Dikaitkan sedikit dengan fenomena orang-orang Sukareja, Indramayu, Jawa Barat yang pernah mengalami perampasan di masa lalu, pertanyaannya, mengapa di hari ini mereka mau untuk kembali mengalami kehilangan lahannya lagi demi pembangunan perusahaan petrokimia yang sedang akan dibangun. Atau pun dikaitkan dengan konteks orang-orang di kawasan Halmahera, di Indonesia timur di mana kawasan tersebut telah dikepung berbagai perusahaan dan menciptakan berbagai dampak buruk. Pertanyaannya lagi, mengapa orang-orang Halmahera justru mengundang perusahaan untuk menyerahkan lahannya untuk pembangunan perusahaan-perusahaan baru. Buruknya pembacaan atas fenomena semacam itu akan menghasilkan pembacaan yang menuduh orang-orang yang pernah mengalami kehilangan sebagai suatu pilihan yang tidak tepat atau bahkan sematan “rakus” tak terhindarkan, karena secara ekonomi keputusan orang-orang itu tampak rasional.

3.2. Memahami Pengalaman Kehilangan

Kurang memadainya pembacaan fenomena mengenai orang-orang yang justru mengundang perusahaan tambang untuk membeli lahannya di Halmahera yang dikepung oleh perusahaan tambang. Dan tak sedikit kemudian, advokat dan aktivis yang melabeli orang-orang tertentu di sana sebagai orang yang rakus dan semacamnya (Komunikasi dengan A, 2023). Ketika fenomena tersebut dipandang dari perspektif, misalkan, akuisisi lahan, perampasan tanah, perampasan, perampasan lahan. Maka yang akan terjadi, tuduhan “rakus” itu tidak dapat dihindarkan muncul kepada orang-orang tersebut.

Padahal ketika jika dipikirkan ulang lebih mendalam, boleh jadi terdapat cara pandang yang kurang tepat sehingga label semacam itu bisa muncul. Persis sama ketika label “miliarder” juga tersemat pada orang-orang di Balongan, Indramayu maupun di Jenu, Tuban. Ketika berita kekecewaan orang-orang Jenu yang akhirnya tak lagi mendapatkan pekerjaan dan kembali menjadi miskin (Ihsan, 2022), tak ayal label “rakus” mungkin juga akan tersemat pada diri orang-orang itu yang rela menukar lahan dengan ganti rugi uang “miliaran” atau bahkan mobil. Dan seolah-olah keputusan semacam itu diambil tanpa memikirkan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi.

Namun, pertanyaannya, mengapa label semacam itu bisa muncul. Cara pandang semacam apa yang justru membuat label semacam itu bisa muncul. Saya menduga istilah yang dipilih dan diperdebatkan hingga hari ini seputar perampasan, perampasan lahan, akuisisi lahan, dan semacamnya. Istilah tersebut lebih banyak melihat pengalaman orang-orang yang dirampas di kawasan tertentu, sebagai pengalaman yang sekadar diidentifikasi secara visual, fisik, dan jasmani. Kurang atau bahkan tidak melihat mengapa kehilangan lahan atau tempat tinggal bisa terjadi, atau mengapa orang-orang itu mau untuk “mengalami kehilangan”, dan terus mengalami kehilangan lagi padahal pernah mengalami kehilangan sebelumnya.

Berangkat dari hal tersebut, Severin Fowles (2016) memiliki argumen bahwa dalam metodologi antropologi lama telah mewariskan cara-cara pembacaan semacam itu, yakni melihat langsung “kehilangan” dari diri langsung orang-orang, bukan dengan “mendekatinya”. Artinya, antropologi lama kurang mampu menciptakan refleksi antara peneliti dengan tineliti. Persis sama ketika kembali dikaitkan dengan istilah-istilah yang berkembang dalam konteks perdebatan mengenai perampasan, khususnya maksud perampasan tanah, Tobias Haller (2019) memiliki argumen untuk mengkritik istilah yang berkuat pada perampasan tanah, atau makna “tanah” itu sendiri telah dipersempit oleh beberapa pemikir, bahkan agensi untuk kepentingan tertentu. Apa yang dirampas dari orang-orang, menurutnya, bukan hanya “tanah” melainkan “ketahanan dan institusi milik bersama”.

Namun lagi-lagi, meskipun pandangan Haller itu terasa lebih luas daripada pemikir lainnya, namun dapat diakui bahwa perdebatan mengenai apa yang dirampas masih sekadar pada hal-hal yang secara visual, jasmani, dan fisik dapat dilihat. Belum ada pengakuan mengenai “pengalaman kehilangan” dan mengapa orang-orang mau untuk kehilangan atau kembali untuk mengalami kehilangan. Dalam hal ini, kita akan masuk untuk terlebih dahulu menyelami dan memahami pengalaman kehilangan.

3.2.1. Menyelami Pengalaman Kehilangan: Kehilangan Sebagai Bagian dari Dunia Material

Setiap orang hampir pernah mengalami kehilangan. Baik kehilangan barang-barang, kehilangan keluarga, teman, bahkan kehilangan impian maupun kehilangan kemampuan untuk merencanakan masa depan, atau jenis kehilangan yang lain yang tidak pernah diungkap maupun ditulis sebelumnya. Meskipun bagi sebagian orang pengalaman kehilangan mungkin saja bagaikan samar yang sayup-sayup hadir dalam kehidupan sehari-hari karena dibalut “kehadiran” lain. Seperti sebuah pengalaman masa lalu yang melintas kadang-kadang di masa kini. Namun, antara yakin dan tidak yakin, mengapa pengalaman kehilangan di masa lalu itu betapapun samar-samarnya karena melintas cepat, tapi pada kenyataannya bukan saja masih berpengaruh namun justru menjadi orientasi untuk masa kini.

Mirip dengan cerita para penyintas tsunami dari Desa Tharangambadi, India Selatan, yang dituliskan oleh Frida Hastrup (2010). Barang-barang rusak, rumah-rumah yang hilang, anak-anak dan kerabat yang meninggal karena pengalaman tsunami besar di masa yang telah berlalu. Justru segala yang hilang dan tak mungkin pulih kembali itu menjadi titik orientasi para penyintas tsunami untuk membuat bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dimasukkan oleh para penyintas ke dalam konteks sosial yang biasa. Alih-alih menghindari dari bencana, para penyintas membiarkan bencana perlahan terjadi (Hastrup, 2010). Ditunjukkan pada pemulihan bencana yang dipilih para penyintas. Daripada memilih pulih dari bencana secara “formal” seperti yang dikehendaki pemerintah. Para penyintas justru membiarkan barang dan rumah yang rusak itu sebagai penanda untuk mengenal bencana, serta untuk menghafal bagaimana bencana terjadi.

Karenanya, bicara pengalaman yang telah berlalu, termasuk pengalaman kehilangan, tidak serta merta retrospektif. Praksis yang dilakukan oleh penyintas tsunami di Tharangambadi menunjukkan bagaimana pengalaman bencana yang membuat benda, rumah, dan sanak saudara hilang, justru menjadi titik orientasi. Mereka tetap menyimpan barang-barang yang rusak, hapal dengan tempat-tempat yang diterjang tsunami. Meskipun sebagian besar tak dapat dipulihkan, namun benda-benda tersebut sama pentingnya (Hastrup, 2010). Pengalaman itu membawa mereka pulih dengan mengenal kehadiran bencana, walaupun dengan diliputi ketidakpastian sebab suatu saat mungkin bencana mungkin akan datang kembali.

Inilah mengapa, membaca kembali masa lalu seperti yang dikatakan oleh seorang sejarawan bernama Eelco Runia (2006) bukanlah suatu upaya yang mustahil. Terlebih karena menurutnya sesuatu yang diskontinu-itu-kontinu. Dengan mengutip Honoré de Balzac (1913), Runia meyakini masa lalu sebagai kehadiran yang aktual. Dan bahkan seseorang tak dapat mengalami masa kini selain sebagai “*potential past*” (Balzac, 1913). Artinya, sesuatu seperti pengalaman kehilangan, misalkan, ketika pengalaman itu berlangsung di waktu tertentu di masa lalu, bukan berarti pengalaman kehilangan itu berhenti begitu saja.

Namun, seperti bahasa Tim Flohr Sørensen (2010) orang-orang akan “terjerat”, baik dengan benda-benda, orang lain, ketidakpastian, kematian, bencana, dan sebagainya dari masa lalu. Dan masa kini dengan begitu ialah untaian masa lalu. Tak pelak “antisipasi” dapat menjadi

salah satu hal yang dapat dipilih untuk “menjembatani” jeratan masa lalu yang secara aktual hadir di hari ini untuk bekal menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dalam konteks tersebut akhirnya, pengalaman kehilangan menjadi semakin mengemuka sebagai hal yang menjadi “bagian dari dunia material”.

Lantas mengapa kehilangan di aras pemikiran arus utama tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang material. Padahal secara nyata menjerat berbagai hal, seperti benda, orang, dan sebagainya secara relasional, dari masa lalu ke masa masa kini. Atau menurut Severin Fowles (2016) mengapa kehilangan, ketidakhadiran yang nyata itu tidak setara dengan hal dan makna, dan justru saling dipisahkan–pandangan Riversian. Akibatnya, ketika pengalaman kehilangan maupun ketidakhadiran berlangsung di waktu tertentu seolah-olah kedua pengalaman itu dianggap sebagai artefak. Namun, sebagai artefak yang sulit untuk dijangkau karena datang dari suatu waktu yang telah berlalu. Padahal ditegaskannya, tidak adanya bukti bukan berarti sesuatu itu tidak hadir (Fowles, 2010). Namun, ketidakhadiran maupun kehilangan selama ini, diakui sebagai “kekosongan” belaka, maupun dianggap sekadar sebagai suatu keinginan atau kerinduan akan sesuatu (Bille, Hastrup, & Sørensen, 2010).

Adapun sebab-sebab yang menengarai mengapa suatu “kehilangan” tidak diakui sebagai bagian dari dunia material dan selama ini justru terlalu sibuk dicari materialitasnya melalui proses “pemaknaan” terhadap “kehilangan”. Atau suatu proses yang melihat “kehilangan” dari “pandangan dunia material” atau melihatnya eksternal, bukan dilihat tercakup sebagai “bagian dari dunia material” yang tak perlu dipertanyakan materialitasnya. Menurut Victor Buchli (2010) hal tersebut disebabkan oleh pengetahuan kita selama ini yang didominasi oleh dualisme produktif Cartesian dan Kantian, yang cenderung memisahkan dua hal antara yang berwujud dengan yang tak berwujud, dan meyakinkannya secara universal. Seperti pemisahan radikal antara Alam dan Manusia (Smith, 2008), pemisahan benda dengan makna, bahkan pemisahan materi dengan non-materi.

Ataupun menurut Runia (2006) hal tersebut ditengarai dominasi, khususnya para sejarawan penganut representasionalis yang tak meyakini spekulasi, yang membuat pembacaan sejarah utamanya mengenai “memori” kurang memungkinkan dilakukan. Konsekuensinya, metode sejarah didominasi oleh metahistoriografi, dan bukan metahistori. Artinya, sejarah cenderung didominasi oleh cerita mengenai “pola” daripada berisi filsafat sejarah yang reflektif yang mungkin mengandung “spekulasi” terhadap masa lalu yang telah terjadi.

Berbagai konsekuensi itulah yang barangkali memantik banyak pemikir untuk mengkritik teori-teori sosial abad ke-20. Di antaranya adalah para pemikir yang disebutkan oleh Fowles (2010, 2016) seperti Edward Said, Daniel Miller, dan Bjørnar Olsen. Beberapa pemikir tersebut melayangkan kritik dan tengah menuju arus pemikiran yang disebut post-humanisme pasca-kolonial yang berkembang pada ilmu humaniora (Wolfe, 2003). Proyek pasca-kolonial menurut Latour perlu digabungkan dengan post-humanisme (Fowles, 2016). Sebab problem yang dihadapi teori sosial akhir abad 20 adalah, para ilmuwan sosial tak pernah mempermasalahkan kaisar agung mereka, “masyarakat” dalam tiap hasil studi yang mereka anggap “representasional” (Miller, 2005). Selain itu, metode sejarah benar-benar menghindari spekulasi dan sulit membaca, misalkan, pengalaman dan kesaksian orang-orang di masa kini berkaitan dengan masa lalu (Runia, 2006).

Bruno Latour (1999) kemudian memperjelas kritiknya dengan mengangkat keluhan sebagian antropolog terhadap diskursus antroposentrisme. Sumber sebab mengapa akhirnya era manusia menurut Miller (2005) justru begitu digdaya sebagai “tirani subjek” atas bukan manusia dan berujung dengan memperlakukan bukan manusia sebagai “bawahan” (Olsen, 2003). Termasuk bagi Latour, mengapa setiap penjelasan seperti “kehilangan” dalam konteks ini

akhirnya harus melalui subjek manusia untuk diakui ada.

Fowles (2010) kemudian lebih menerangkan argumen Latour tersebut dengan sebuah cerita mengenai kunci yang ada di saku seseorang dan mengeluarkan bunyi gemerincing. Ketika kunci seseorang hilang, dan tak didapati lagi di saku seseorang itu bunyi gemerincing. Orang itu berakhir di depan sebuah kamar apartemen dengan badannya yang kedinginan. Cerita tersebut menyiratkan, bahwa ketika kehilangan kunci itu berdampak pada seseorang, eksisnya “kehilangan” baru dapat diakui.

Antropologi lama menurut Fowles mengidap antroposen ringan semacam itu. Terlebih ketika ia mengelaborasinya melalui kisah antropolog Era Victoria yang mengidentifikasi dan mencatat berbagai hal dari penduduk asli secara visual, fisik, dan jasmani, khususnya mengenai ketelanjangan mereka. Penduduk asli yang didapati oleh mereka tanpa pakaian, kemudian menjadi inspirasi lukisan dan kemudian dipajang untuk dipamerkan kepada publik kala itu. Kehilangan dilihat oleh peneliti saat itu sebagai sekadar “ketidaklengkapan”. Menurut antropolog Era Victoria terhadap penduduk asli kala itu yang tak berpakaian, penduduk asli kehilangan sesuatu dalam diri mereka yang membuat mereka tak selengkap peradaban peneliti. Tak pelak, penduduk asli menjadi tontonan dan ditelanjangi di ranah publik. Tanpa seorang pun malu menonton ketelanjangan dengan pakaian mereka yang lengkap.

Menurut Fowles (2010) mengapa hal demikian terjadi di era tersebut. Karena tidak mampunya cara-cara antropologi lama menciptakan refleksi antara peneliti dengan tineliti. Cara-cara yang cenderung membaca kehilangan ataupun ketidakhadiran dalam diri langsung manusia—secara visual, fisik, dan jasmani—bukan dengan “mendekati” manusia. Sehingga menurutnya, kehilangan cenderung disamakan dengan ketidaklengkapan yang memicu keinginan tertentu. Penjelasan yang lebih banyak berasal dari pandangan Sigmund Freud mengenai hasrat atau keinginan yang tak lain lahir dari rahim kolonial Eropa (Fowles, 2010). Atau yang Edward Said sebut sebagai antroposentrisme yang bersekutu dengan Europosentrisme (Said, 1989).

Karenanya, persis seperti Latour dan Fowles, betapapun sulitnya menjauhi antroposen ringan dan Fowles secara khusus menyarankan untuk sebaiknya tidak menyamakan kehilangan sekadar sebagai ketidaklengkapan yang memicu keinginan belaka, maupun ketidakhadiran yang direduksi sekadar “gagasan”. Maka selangkah lebih maju, ketidakhadiran maupun kehilangan dengan begitu merupakan bagian dari dunia material, meskipun kadang kala tak dapat langsung diamati secara visual, fisik, dan jasmani.

Ketika telah sampai pada maksud dari pengalaman kehilangan, ketidakhadiran, sebagai bagian dunia material. Yang artinya semua itu dapat dipahami dan diakui tidak melulu harus melalui subjek manusia, karena kadang tak dapat dilihat secara visual, fisik, dan jasmani, melainkan dengan cara mendekati manusia. Barulah kita dapat betul-betul mengakui dan mengamati jenis-jenis kehadiran, kehilangan, dan ketidakhadiran.

Dan bahwa terdapat jenis-jenis kehadiran yang mengganggu dan potensi kembalinya kehilangan yang “ditambal” melalui berbagai siasat oleh agensi tertentu yang tak lain demi kepentingan ekonomi-politik melalui suguhan “kehadiran” yang mengganggu tersebut. Meskipun lebih jauh lagi, kehadiran tidak selalu tercakup dalam diri mereka yang hidup, melainkan tertanam pula dalam diri mereka yang hilang atau tidak hadir secara fisik, visual, dan jasmani (Sørensen, 2010). Penjelasan yang dapat dikontekstualisasikan dengan fenomena yang telah saya sebutkan pada latar belakang dan kaitannya dengan “*benign capitalism*” atau kapitalisme yang beroperasi dengan ramah-tamah.

3.3. Kapitalisme Seolah-Olah sebagai Kawan: *Benign Capitalism* sebagai Kehadiran yang Mengganggu

Fenomena agraria kiwari mengenai orang-orang Halmahera yang mengundang perusahaan untuk penyerahan sertifikat lahannya demi kepentingan operasi perusahaan pertambangan. Maupun fenomena orang-orang yang mendadak menjadi miliarder di Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur dan Kecamatan Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Fenomena agraria semacam itu ketika didekati dengan penjelasan tentang operasi kapitalisme yang dibayangkan pada pertentangan pekerja dengan pemberi kerja atau kapitalisme pabrik, mungkin hanya akan menghasilkan pembacaan mengenai sebuah “kekalahan” karena warga tertentu akan dianggap sebagai komunitas yang rakus.

Merefleksikan hal tersebut, tulisan dari Rohan D’Souza (2005) yang mengulas buku kontroversial Jared Diamond berjudul *Collapse: how societies choose to fail or succeed* (2011) dapat menjadi awal untuk memikirkan ulang mengapa beberapa komunitas di Halmahera yang justru mengundang perusahaan untuk menyerahkan sertifikatnya ke perusahaan kemudian oleh beberapa advokat dan aktivis dianggap rakus. Dalam satu kritik yang dilayangkan D’Souza pada bagian 14 tulisan Diamond, berjudul *Collapse*, ia menyoroti pertanyaan Diamond tentang mengapa beberapa masyarakat mengambil keputusan yang membawa bencana. Akibatnya, keruntuhan masyarakat pun tak terhindarkan sebagai konsekuensi atas pilihan salah tersebut.

Menurut D’Souza, pemahaman Diamond itu berakar dari pemahaman dari apa yang ia sebut sebagai *benign capitalism*. Karena, selanjutnya, menurut Diamond untuk keluar dari sebuah keputusan yang salah, maka menurutnya kebijakan yang baik, kemampuan antisipasi, etika bisnis yang baik dapat menjadi solusi. Padahal menurut D’Souza dengan menekankan pada pendapat Gorz (1980) tawaran solusi semacam itu hanya merupakan celah bagaimana kapitalisme “menyesuaikan” kondisi eksploitasinya. Sehingga, tak mengejutkan ketika Diamond masih meyakini pilihannya, misalkan, pada praktik pertambangan yang bijaksana, perilaku bisnis yang bertanggung jawab yang masih memikirkan batas ambang sosial, dan menoleransi proses bagaimana “masyarakat yang mampu memperbaiki kesalahan”.

Lalu, apakah kemudian ketika dikaitkan dengan tuduhan “rakus” para aktivis dan advokat kepada beberapa orang di Halmahera, ketika beberapa orang tersebut memutuskan hal yang berbeda yakni tidak mengundang perusahaan untuk menyerahkan sertifikat lahannya, apakah kapitalisme dalam rupa pertambangan di Halmahera akan berhenti. Ataukah, yang perlu dipikirkan ulang sebenarnya adalah cara-cara mengapa beberapa komunitas bisa sampai mengundang perusahaan tambang untuk menyerahkan sertifikat lahannya untuk dibeli.

Apakah ada cara-cara kapitalisme kiwari untuk, alih-alih secara konfrontatif tetap bertentangan dengan kelas-kelas yang berbeda, atau seperti yang dikatakan oleh Gorz (1980) kekuasaan yang tercakup dalam kapital “memohon dengan ramah” atas kediktatoran kapitalnya. Seorang pemikir yang meneliti mengenai perkembangan kapitalisme Asia, khususnya kapitalisme Korea, Dennis L. McNamara (2012). Menurutnya, terdapat pergeseran strategi bisnis yang semula bersifat organik-statis, yakni mulanya pembentukan kapitalisme di Korea begitu terikat dengan peran negara. Kini, kapitalisme berkembang dengan strategi yang bersifat ramah dan kompetitif, dengan tetap memainkan peran Negara sebagai pusat ekonomi pasar, namun kontradiktif dengan model hubungan bisnis-negara yang liberal-pluralis.

Singkatnya, momen neoliberalisme, yang agak berbeda dengan cara-cara liberal klasik di mana tidak membutuhkan negara dalam ekonomi pasar, saat ini menjadi membutuhkan negara bahkan juga aktor non-negara (Devine & Baca, 2020). Sehingga, kemiripan pada konteks rezim Orde Baru di Indonesia, di mana terbentuk kapitalisme negara, yang berarti tujuan

mengedepankan keuntungan seluas-luasnya yang terinstitusionalisasi ke dalam negara eksis (Bosman Batubara, 2020b). Pasca Orde Baru hingga saat ini, kapitalisme negara masih dibutuhkan, bukan sebagai kenyataan dari momen yang tumpang tindih, melainkan “relasional” dengan “kapitalisme yang terencana” yang bersifat neoliberal.

Utamanya ketika dikaitkan dengan konteks Indonesia belakangan dalam rupa Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN dilihat sebagai prinsip dari negara (Bosman Batubara, 2020a), dalam praktiknya digunakan untuk menaungi kebijakan, misalkan, perluasan kilang (RDMP) di Tuban (Muliawati, 2023), dan pembangunan perusahaan Petrokimia di Indramayu, Jawa Barat. Refleksi pada kenyataan semacam itu menurut McNamara (2012) memberi pandangan bahwa dalam konteks “kapitalisme terencana” saat ini, negara tak lagi berfungsi sebagai pengendali perusahaan swasta, melainkan sebagai “mitra senior”. Yang mana proyek seperti PSN dijalankan dalam koridor “perencanaan bersama” perusahaan swasta/asing dengan negara, yang tidak dapat dilepaskan dari diskursus mengenai “tujuan nasional”.

Sehingga tak jarang diberitakan di media, proyek yang menyedot investasi ratusan triliunan rupiah dari China Petroleum Corporation (CPC) Taiwan, khususnya di Balongan, Indramayu di mana perusahaan petrokimia akan dibangun sebagai bagian proyek perluasan kilang (RDMP) dalam koridor PSN, digaungkan sebagai proyek yang akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas di sekitar operasi perusahaan (Handayani, 2021). Bahkan, untuk eksekusi, misalkan, mengenai pembebasan lahan di beberapa tempat, khususnya di Indramayu, Jawa Barat, untuk menghindari konfrontasi dengan warga secara langsung, tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun dengan kekerasan. Namun perusahaan, lagi-lagi mengutip Gorz (1980) dengan ramah tamah “memohon” untuk melancarkan kediktatorannya, yakni melalui studi banding antara warga Balongan, Indramayu dengan warga Jenu, Tuban. Tak pelak, keinginan warga untuk menjadi miliarder melalui ganti rugi pembebasan lahan dan kemudian berbagai citra “miliarder” yang disematkan pada orang-orang di Balongan itu, adalah manifestasi dari kehadiran kapitalisme yang ramah.

Di samping itu, diberikannya beasiswa untuk pemuda sekitar untuk kuliah gratis di Akamigas Balongan dan Politeknik Indramayu (Polindra) sebagai bagian dari CSR perusahaan petrokimia (Handayani, 2021), juga dapat menjadi cerminan dari perilaku bisnis yang bertanggung jawab atau cerminan dari wujud kapitalisme jinak tersebut. Di mana, perilaku bisnis yang bertanggung jawab atau CSR, seringnya menjadi jalan masuk untuk mengubah keputusan warga yang sebenarnya tidak ingin menjual lahannya, namun menjadi memutuskan hal yang sebaliknya.

Karenanya, baik tuduhan rakus bagi beberapa komunitas di Halmahera, ataupun klaim miliarder yang ditujukan kepada warga Jenu, Tuban maupun Balongan, Indramayu. Kesemua itu ketika tidak diungkap secara mendalam hanya menghasilkan klaim mirip argumen Diamond, penulis *Collapse* yang mengaburkan akar persoalan yang sebenarnya dari realitas yang eksis yakni kapitalisme. Menjadi sekadar keruntuhan suatu masyarakat yang berakar pada kesalahannya sendiri atas suatu pilihan yang salah.

4. Simpulan

Merefleksikan berbagai fenomena agraria belakangan, khususnya mengenai orang-orang yang mendadak miliarder karena mendapatkan uang ganti rugi dari pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan perusahaan pengilangan minyak di Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur dan kepentingan pembangunan perusahaan petrokimia di Kecamatan Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Ataupun fenomena orang-orang Halmahera yang justru mengundang perusahaan untuk menyerahkan sertifikat lahannya untuk dijual ke perusahaan pertambangan.

Ketika fenomena agraria kiwari tersebut sekadar dibaca melalui operasi kapitalisme pabrik, yakni pertentangan kelas yang berbeda antara pemberi kerja dengan pekerja. Hasil analisis yang muncul atas pembacaan tersebut masih terasa jauh dari realitas persoalan yang sebenarnya. Terutama pembacaan yang menyangkut pengungkapan atas ketidakpastian kehidupan orang-orang yang hidup di kawasan operasi perusahaan.

Padahal hari ini, kapitalisme memanfaatkan berbagai agensi baik negara maupun non-negara untuk mewujudkan tujuannya meraup keuntungan seluas-luasnya atau neoliberalisme. Yang mana wujudnya berupa kapitalisme yang ramah tamah (*benign capitalism*) yang hadir dalam rupa bisnis yang bertanggungjawab (CSR), etika bisnis, atau perilaku bisnis lainnya yang digadang-gadang masih memikirkan “batas ambang sosial”. Realitas kapitalisme semacam itu memperlihatkan kekuasaan perusahaan yang datang “memohon” untuk melancarkan kediktatorannya, daripada menggunakan lebih banyak kekerasan fisik, misalkan, militerisme ataupun premanisme. Tak ayal undangan orang-orang Halmahera kepada perusahaan untuk penyerahan sertifikat maupun fenomena orang-orang Balongan dan Jenu yang mendadak miliarder hasil dari pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan perusahaan, menjadi wujud operasi kapitalisme yang juga ramah-tamah tersebut.

Operasi kapitalisme yang ramah-tamah semacam itu, disokong pula oleh pergeseran strategi bisnis perusahaan atau korporatisme. Pergeseran korporatisme yang sejalan dengan perkembangan kapitalisme dari yang semula bersifat liberal ke neoliberal. Ketika korporatisme neoliberal diterapkan ke ruang tertentu dan kemudian sekadar diidentifikasi secara visual, fisik, dan jasmani, di mana tak jarang dilihat pada fenomena orang-orang menyerahkan “sertifikat lahan” dengan mudahnya, misalkan, di kawasan Halmahera. Maka, yang akan ditemui adalah tuduhan “rakus” terhadap orang-orang tersebut atau bahkan menghasilkan debat yang sekadar berpusar pada kesalahan orang-orang itu dalam memilih dan memutuskan nasibnya.

Karenanya, pengalaman kehilangan yang banyak dipelajari khususnya dalam antropologi kehilangan (*anthropology of loss and absence*) dapat membantu untuk menyelidiki mengapa orang-orang mau untuk mengundang maupun menyerahkan lahannya ke perusahaan. Mengapa keputusan semacam itu dapat muncul dan dipilih oleh orang-orang itu, serta bagaimana perasaan dan kondisi kehidupan orang-orang tersebut setelahnya. Kemungkinan kesimpulan yang dihasilkan akan menunjukkan penjelasan, bahwa kehadiran kapitalisme yang ramah tamah, membawa bermiliar uang yang secara visual dan fisik besar nominalnya, pada dasarnya kehadirannya itu adalah “kehadiran yang mengganggu”. Bukan kehadiran seperti halnya yang dikatakan oleh Eelco Runia, “kehadiran sebagai ‘berhubungan’ – baik secara harfiah maupun kiasan - dengan orang, benda, peristiwa, dan perasaan yang membuat Anda menjadi diri Anda sendiri” (Runia 2006: 5).

Pembacaan semacam itu tidak lagi sekadar memotret dan melihat pengalaman orang dari lahan maupun tempat tinggalnya yang hilang secara fisik, visual, dan jasmani, melainkan juga bicara pada orang-orang itu tentang kelangsungan hidup setelahnya dan juga bicara tentang “perasaan dan pengalaman” kehilangan orang-orang atas hilangnya lahan dan tempat tinggalnya tersebut, sebagai sesuatu yang sama materialnya. Apakah keputusannya saat itu benar-benar merupakan hal yang membuatnya menjadi diri sendiri atau kini hal tersebut justru “menjerat” dirinya dalam kubangan persoalan lain yang memukul kondisi kehidupannya. Cara-cara pembacaan semacam itu, tidak lagi mengamati langsung diri tineliti dari apa yang dapat dilihat secara visual, jasmani, dan fisik oleh peneliti, melainkan dengan cara “mendekati” tineliti.

Referensi

- Agriesta, D. (2021). *Cerita Warga Tuban Mendadak Jadi Miliarder, Borong Mobil dan Ingin Naik Haji, Ada yang Dirikan Usaha*. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2021/02/17/18173671/cerita-warga-tuban-mendadak-jadi-miliarder-borong-mobil-dan-ingin-naik-haji?page=all>
- Balzac, H. de. (1913). *La comédie humaine*.
- Batubara, Bosman; dkk. (2021). *Banjir sudah naik seleher: ekologi politis urbanisasi das-das di Semarang*. Cipta Prima Nusantara.
- Batubara, Bosman. (2020a). *Maleh dadi segoro: krisis sosial-ekologis kawasan pesisir Semarang-Demak*. Lintas Nalar.
- Batubara, Bosman. (2020b). *Temas Rebahan: Kapitalisme dan Covid-19*. Yogyakarta: Gading.
- Bhattacharya, T. (2017). *Social reproduction theory: Remapping class, recentering oppression*.
- Bille, M., Hastrup, F., & Soerensen, T. F. (2010). *An anthropology of absence: materializations of transcendence and loss*. Springer.
- Bille, M., Hastrup, F., & Sørensen, T. F. (2010). Introduction: An anthropology of absence. *An Anthropology of Absence: Materializations of Transcendence and Loss*, 3–22.
- Brenner, N., & Schmid, C. (2015). Towards a new epistemology of the urban? *City*, 19(2–3), 151–182.
- Buchli, V. (2010). Presencing the im-material. *An Anthropology of Absence: Materializations of Transcendence and Loss*, 185–203.
- CNN Indonesia. (2021). *Nestapa Warga “Desa Miliarder” Indramayu: Tanah Dibeli Murah*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210416202530-20-631031/nestapa-warga-desa-miliarder-indramayu-tanah-dibeli-murah>
- D’Souza, R. (2005). *Benign Capitalism by Another Name: Understanding Collapse*. JSTOR.
- Darmanto. (2013). Rehal: krisis lingkungan, kapitalisme, dan tantangan ekologi politik. *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*, 30, 165–182.
- Devine, J. A., & Baca, J. A. (2020). The political forest in the era of green neoliberalism. *Antipode*, 52(4), 911–927.
- Fowles, S. (2010). People without things. *An Anthropology of Absence: Materializations of Transcendence and Loss*, 23–41.
- Fowles, S. (2016). The perfect subject (postcolonial object studies). *Journal of Material Culture*, 21(1), 9–27.
- Fraser, N., & Jaeggi, R. (2018). *Capitalism: A conversation in critical theory*. John Wiley & Sons.
- Goetz, A. (1980). *Ecology as politics*. Black Rose Books Limited.
- Haller, T. (2019). The different meanings of land in the age of neoliberalism: Theoretical reflections on commons and resilience grabbing from a social anthropological perspective. *Land*, 8(7), 104.
- Handayani, L. S. (2021). *Menyambut Masa Depan di Petrochemical Pertamina*. Republika Online. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qzbx1c396/menyambut-masa-depan-di-petrochemical-pertamina>
- Hastrup, F. (2010). Materializations of disaster: recovering lost plots in a tsunami-affected village in South India. *An Anthropology of Absence: Materializations of Transcendence and Loss*, 99–112.
- Ihsan, D. (2022). *Warga Kampung Miliarder Tuban Jatuh Miskin, Ini Tanggapan Pakar UGM*. Kompas. <https://www.kompas.com/edu/read/2022/01/26/155946071/warga-kampung-miliarder-tuban-jatuh-miskin-ini-tanggapan-pakar-ugm?page=all>

- Kurniati, P. (2021). *Proyek Petrochemical Complex Dibangun, Warga di Indramayu Jadi Miliarder Dadakan, Kepala BPN: Jangan Dibelikan Mobil lalu Mencicil*. Kompas.Id. <https://regional.kompas.com/read/2021/04/16/060219778/proyek-petrochemical-complex-dibangun-warga-di-indramayu-jadi-miliarder?page=all>
- Latour, B. (1999). *Pandora's hope: Essays on the reality of science studies*. Harvard university press.
- Maneke, A. (2016). *Hidup di Lumbang Minyak* (Issue November 2015). Sajogyo Institute.
- Marx, K. (2004). *Kapital, sebuah kritik ekonomi politik, buku I: proses produksi kapitalis secara menyeluruh*. Jakarta: Hasta Mitra.
- McCarthy, J. F. (2010). Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia. *The Journal of Peasant Studies*, 37(4), 821–850.
- McNamara, D. L. (2012). Benign capitalism—idea and institution. In *Corporatism and Korean Capitalism* (pp. 54–74). Routledge.
- Miller, D. (2005). *Acknowledging consumption*. Routledge.
- Moore, J. (2015). *Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital*. Verso Books.
- Moore, J. W. (2017). The Capitalocene, Part I: on the nature and origins of our ecological crisis. *The Journal of Peasant Studies*, 44(3), 594–630.
- Moore, J. W. (2018). The Capitalocene Part II: accumulation by appropriation and the centrality of unpaid work/energy. *The Journal of Peasant Studies*, 45(2), 237–279.
- Muliawati, F. D. (2023). *Sempat Bikin Warga Kaya Mendadak, Begini Kabar Kilang Tuban*. CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230327112402-4-424741/sempat-bikin-warga-kaya-mendadak-begini-kabar-kilang-tuban>
- Olsen, B. (2003). Material culture after text: re-memembering things. *Norwegian Archeological Review*, 36(2), 87–104.
- Patel, R., & Moore, J. W. (2017). *A history of the world in seven cheap things: A guide to capitalism, nature, and the future of the planet*. Univ of California Press.
- Priyanto, T. I. (2021). *Melihat Lebih Dekat Lokasi Proyek Petrochemical Complex di Indramayu*. Kumparan - Ciremai Today. <https://kumparan.com/ciremaityday/melihat-lebih-dekat-lokasi-proyek-petrochemical-complex-di-indramayu-1vZ2ZHrW110/full>
- Runia, E. (2006). Presence. *History and Theory*, 45(1), 1–29.
- Said, E. W. (1989). Representing the colonized: Anthropology's interlocutors. *Critical Inquiry*, 15(2), 205–225.
- Sapropudin. (2021). *Pertamina Cairkan Dana Pembebasan Lahan Komplek Petrokimia di Balongan*. Pelita News. <https://harianpelitanews.id/pertamina-cairkan-dana-pembebasan-lahan-komplek-petrokimia-di-balongan/>
- Smith, N. (2008). Uneven development. *Nature, Capital, and the Production of Space*.
- Sørensen, T. F. (2010). A saturated void: anticipating and preparing presence in contemporary Danish cemetery culture. *An Anthropology of Absence: Materializations of Transcendence and Loss*, 115–130.
- Swyngedouw, E. (1996). The city as a hybrid: On nature, society and cyborg urbanization. *Capitalism Nature Socialism*, 7(2), 65–80.
- Swyngedouw, E. (2006). Circulations and metabolisms:(hybrid) natures and (cyborg) cities. *Science as Culture*, 15(2), 105–121.
- White, B., Borrás Jr, S. M., Hall, R., Scoones, I., & Wolford, W. (2012). The new enclosures: critical perspectives on corporate land deals. *The Journal of Peasant Studies*, 39(3–4), 619–647.
- Wolfe, C. (2003). *Animal rites: American culture, the discourse of species, and posthumanist theory*.

University of Chicago Press.